



EVALUASI PUBLIK TERHADAP KINERJA 6 BULAN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

Dampak Kerja 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK

Temuan Survei 23 - 31 Maret 2015

PENDAHULUAN

2

- Skema konstitusi menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hingga memegang kendali penuh proses kebijakan dan sekaligus politik didalamnya.
- Evaluasi 1 semester diperlukan agar pemerintah memiliki waktu yang tepat (tidak terlalu cepat ataupun lama), dalam menyesuaikan ritme kerja dari masa transisi pemerintahan sebelumnya. Sehingga, seluruh kementerian (baik kementerian lama maupun baru) dan perangkat birokrasi yang mendukungnya dapat bekerja efektif dalam mengorganisasikan institusi dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai Nawacita.
- Capaian dalam semester I ini menjadi bukti keseriusan pemerintahan Jokowi-JK, sekaligus pembeda, apakah pemerintahan yang baru ini lebih baik dari sebelumnya dan konkrit menjawab permasalahan rakyat.
- Program dan capaian dalam semester I menjadi landasan fundamental atau pondasi bagi arah pembangunan selama lima tahun ke depan.
- Atas dasar itulah, membaca kinerja pemerintahan Jokowi-JK menurut persepsi publik menjadi penting dilakukan terlepas pemerintah memiliki institusi atau mekanisme sendiri dalam mengevaluasi. Karena hasil survei ini menjadi masukan amat penting bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja.
- Pertanyaannya, bagaimanakah penilaian publik atas kinerja pemerintah Jokowi-JK? Lebih spesifik, bagaimana publik mengevaluasi kinerja presiden dan wakil presiden?

TUJUAN

3

- Untuk mengetahui kondisi dan problem pokok yang dihadapi oleh masyarakat
- Untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK dan Kabinet Kerja pada enam bulan pertama berjalannya pemerintahannya

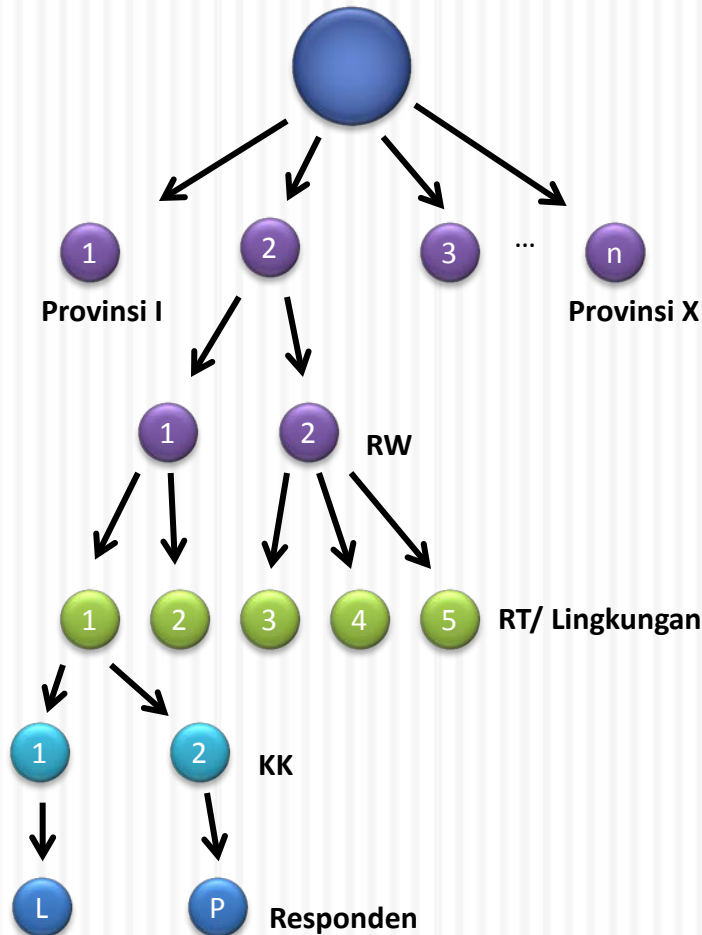
METODOLOGI

4

- Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah pada saat wawancara serta bukan anggota TNI/POLRI
- Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1200 responden dengan *margin of error* +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%
- Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa atau kelurahan
- Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah dengan melakukan cek ulang di lapangan (*spot check*) sekitar 20% dari total data masuk, untuk menjamin akurasi data yang diperlukan. Dalam proses penjaminan metodologi dan akurasi data tidak ditemukan kesalahan berarti
- Waktu wawancara lapangan 23-31 Maret 2015
- Sumber Dana: Poltracking Indonesia (dana yang dihimpun untuk survei publik)

FLOW CHART PENARIKAN SAMPLE

5



- Menggunakan Teknik *Multistage Random Sampling*: Populasi desa/ kelurahan tingkat nasional
- Desa/ kelurahan di tingkat provinsi dipilih secara *random* dengan jumlah proporsional
- Di setiap desa/ kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara *random*
- Di masing-masing RT/ lingkungan dipilih secara *random* dua KK
- Di KK terpilih dipilih secara *random* satu orang dewasa laki-laki/ perempuan yang berhak memilih

VALIDASI SAMPLE

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

KATEGORI	SAMPEL	BPS 2010	KATEGORI	SAMPEL	BPS 2010	KATEGORI	SAMPEL	BPS 2010
Aceh	1.67	1.90	Kalimantan Selatan	1.67	1.54	Riau	2.50	2.38
Bali	1.67	1.65	Kalimantan Tengah	0.83	0.94	Sulawesi Barat	0.83	0.49
Banten	4.17	4.52	Kalimantan Timur	1.67	1.51	Sulawesi Selatan	3.33	3.41
Bengkulu	0.83	0.73	Kep. Bangka Belitung	0.83	0.52	Sulawesi Tengah	0.83	1.12
DIY	1.67	1.47	Kepulauan Riau	0.83	0.72	Sulawesi Tenggara	0.83	0.95
DKI Jakarta	3.33	3.20	Lampung	3.33	3.22	Sulawesi Utara	0.83	0.96
Gorontalo	0.83	0.44	Maluku	0.83	0.65	Sumatera Barat	1.99	2.06
Jambi	1.67	1.31	Maluku Utara	0.83	0.44	Sumatera Selatan	2.99	3.16
Jawa Barat	18.33	18.26	Nusa Tenggara Barat	1.67	1.91	Sumatera Utara	5.47	5.51
Jawa Tengah	13.33	13.75	Nusa Tenggara Timur	1.67	1.99			
Jawa Timur	15.83	15.91	Papua	0.83	1.21			
Kalimantan Barat	1.67	1.86	Papua Barat	0.00	0.32			

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

8

KATEGORI	SAMPEL	BPS 2010
GENDER		
LAKI-LAKI	50.0	50.0
PEREMPUAN	50.0	50.0
DESA - KOTA		
DESA	60	59.4
KOTA	40	40.6

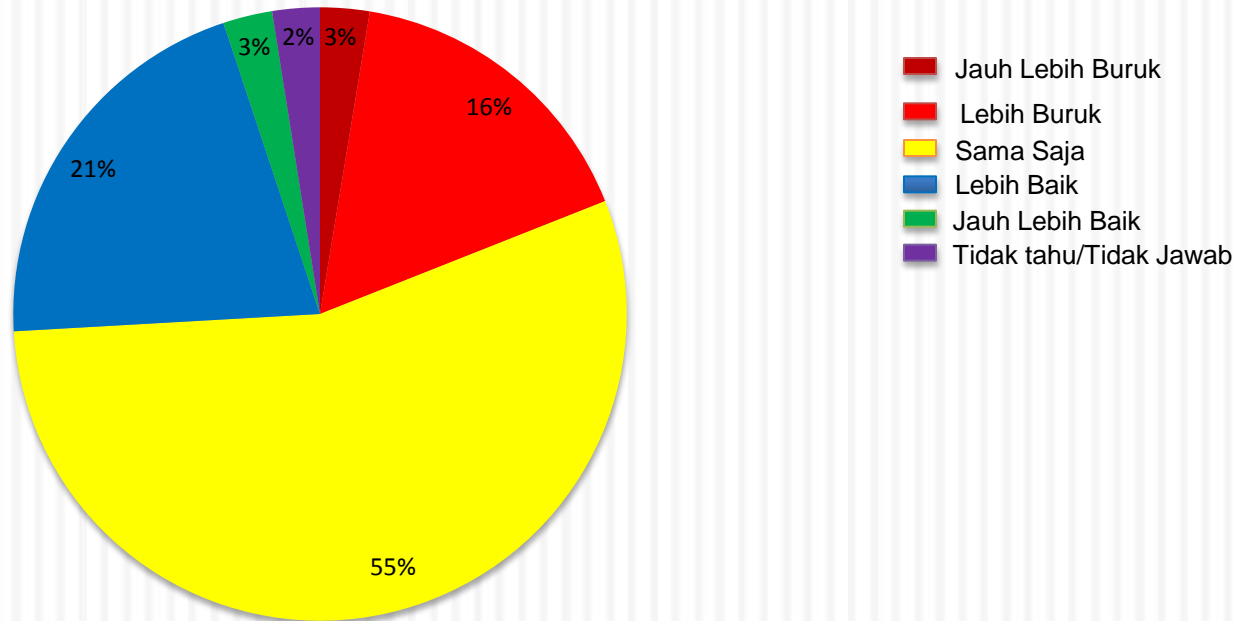
AGAMA	SAMPEL	BPS 2010
ISLAM	89.5	87.9
PROTESTAN	5.22	6.9
KATOLIK	2.5	2.9
HINDU	1.39	1.7
BUDHA	0.2	0.7
KONG HU CU	0.3	0.1
LAINNYA	0.09	0.5

ISU SOSIAL DAN EKONOMI

9



Bagaimana penghasilan rumah tangga Bapak/ Ibu/ Saudara dibanding setahun yang lalu?



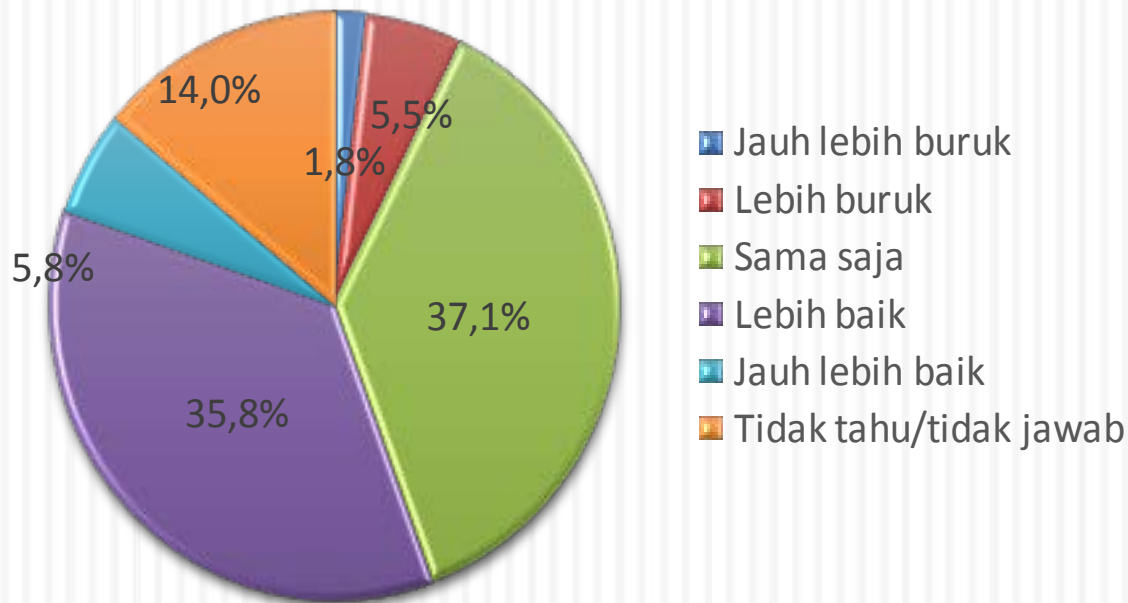
Mayoritas publik mengatakan bahwa penghasilan rumah tangga tidak ada yang berbeda dengan tahun lalu

ISU SOSIAL DAN EKONOMI

10



Menurut perkiraan Bapak/ Ibu/ Saudara, bagaimana penghasilan rumah tangga Bapak/ Ibu/ Saudara dalam satu tahun yang akan datang?



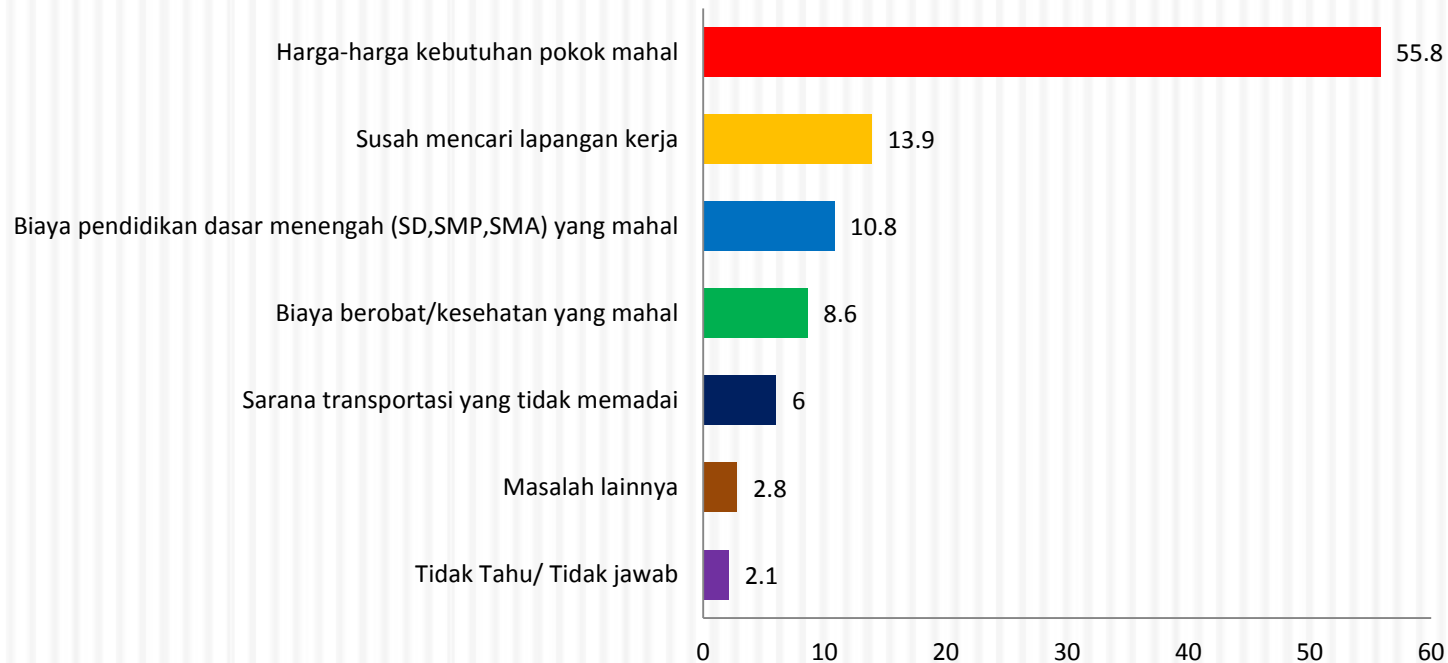
Publik memperkirakan penghasilan rumah tangga sama saja untuk satu tahun yang akan datang.

PERSOALAN POKOK MASYARAKAT

11



Apakah persoalan yang paling pokok yang tengah dihadapi masyarakat saat ini ? ... (%)



Mahalnya harga-harga kebutuhan pokok menjadi masalah paling pokok bagi masyarakat saat ini

TEMUAN

12

- Kesenjangan ekonomi makin besar, hal ini terlihat dari minimnya perbaikan nasib yang dirasakan oleh publik sejak setahun yang lalu. Di sisi lain, mayoritas publik terjebak dalam situasi yang sama atau stagnan dalam setahun terakhir dan bila dua hal ini tidak segera diatasi, masalah ekonomi yang kompleks akan segera terjadi.
- Begitupun untuk setahun yang akan datang, mayoritas publik tak begitu yakin kehidupan ekonominya akan lebih baik. walaupun proporsi dengan yang optimis (Lebih baik dan jauh lebih baik) tak terpaut jauh.
- Persoalan yang paling pokok yang tengah dihadapi masyarakat saat ini terkait tidak stabilnya harga-harga kebutuhan pokok (55,8%), disusul persoalan lapangan kerja (13,9%).
- Berbagai realitas di atas, sebenarnya pekerjaan rumah dari Pemerintahan SBY-Boediono yang dapat membuka peluang bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk membuktikan diri lebih baik dari pemerintahan sebelumnya sekaligus membalik persepsi publik melalui optimalisasi kerja para menteri ekonomi serta memastikan program pemerintah, yakni; tiga kartu sakti (KIP, KIS, dan KKS), pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan bantuan untuk desa-desa tertinggal, terisolir, serta terpencil tepat sasaran.

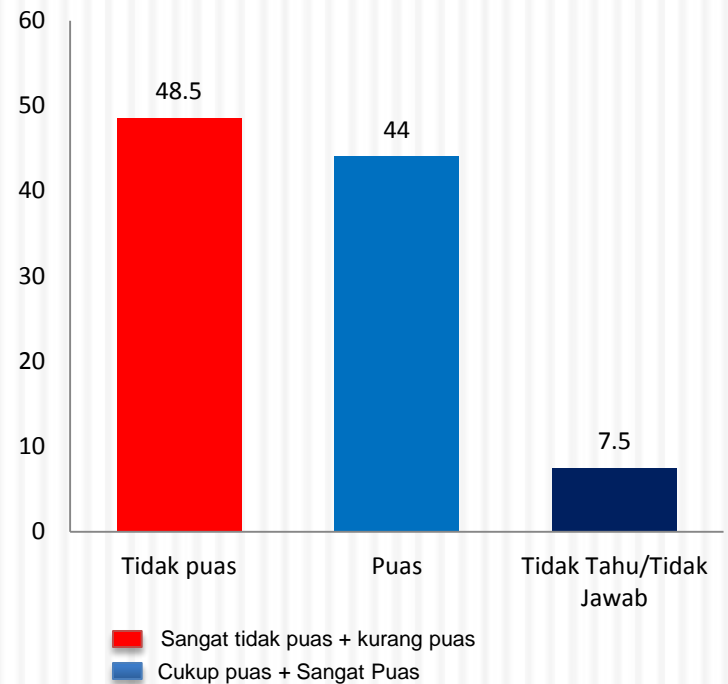
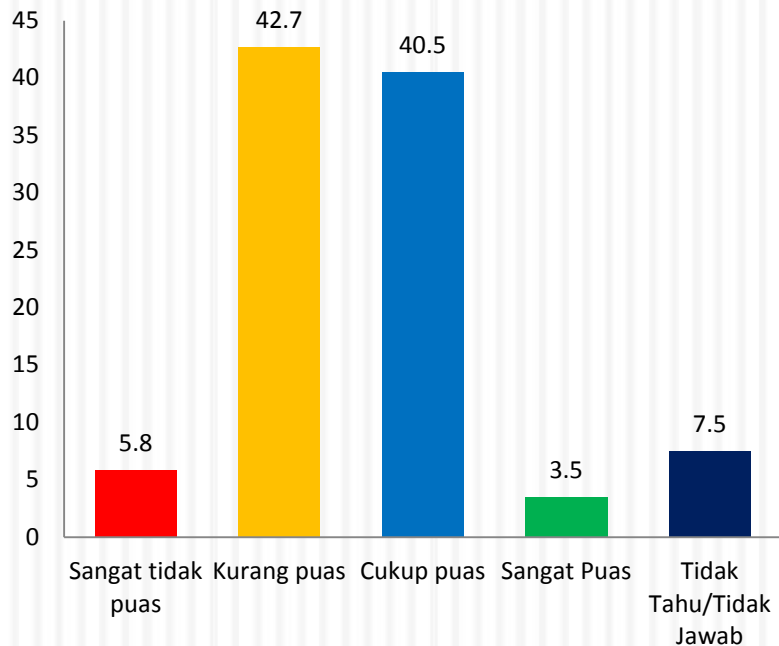
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH

EVALUASI KINERJA KABINET PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

14



Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu/ Saudara terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla? ... (%)



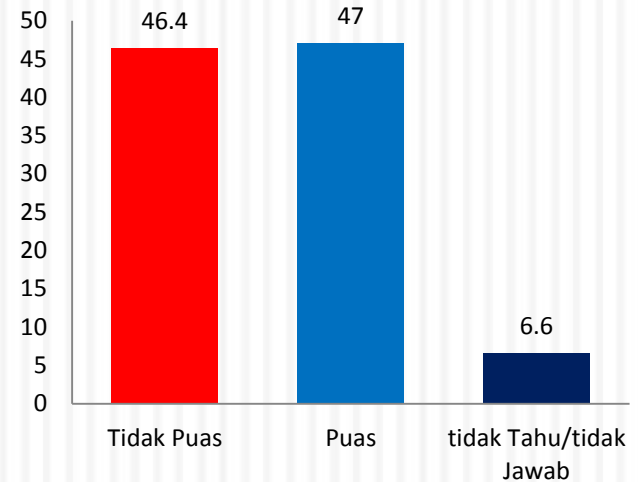
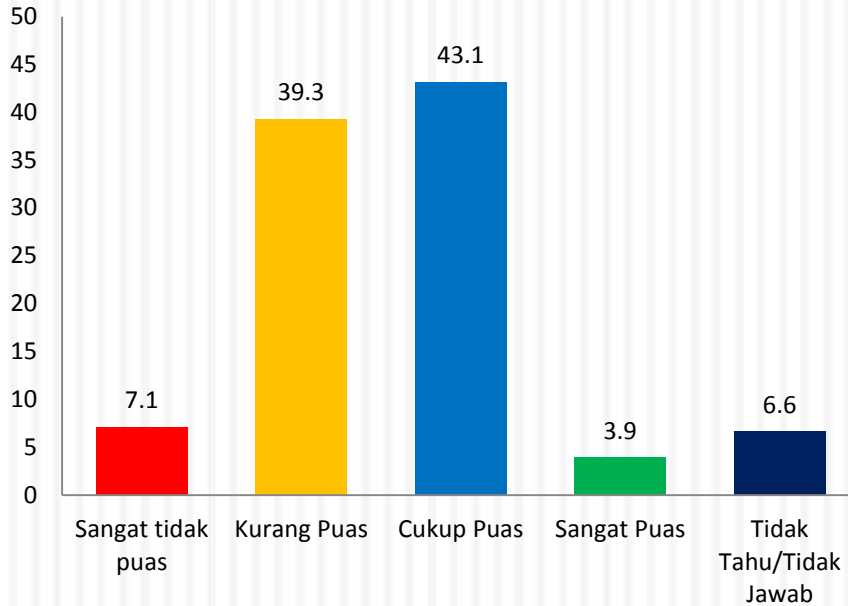
Publik cenderung tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK

EVALUASI KINERJA PRESIDEN JOKOWI WIDODO

15



Bagaimana kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)? ... (%)



■ Sangat tidak puas + kurang puas
■ Cukup puas + Sangat Puas

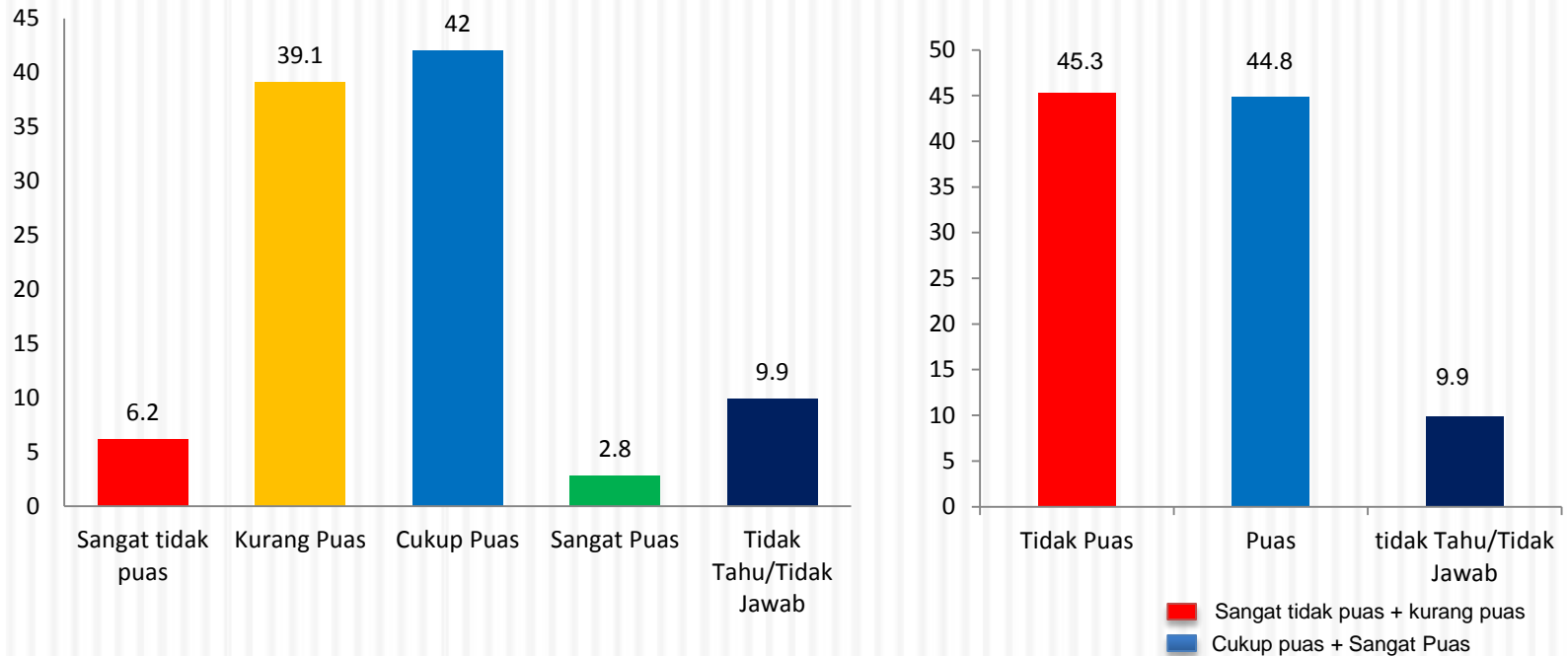
Publik cenderung tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo

EVALUASI KINERJA WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA

16



Bagaimana kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)? ... (%)



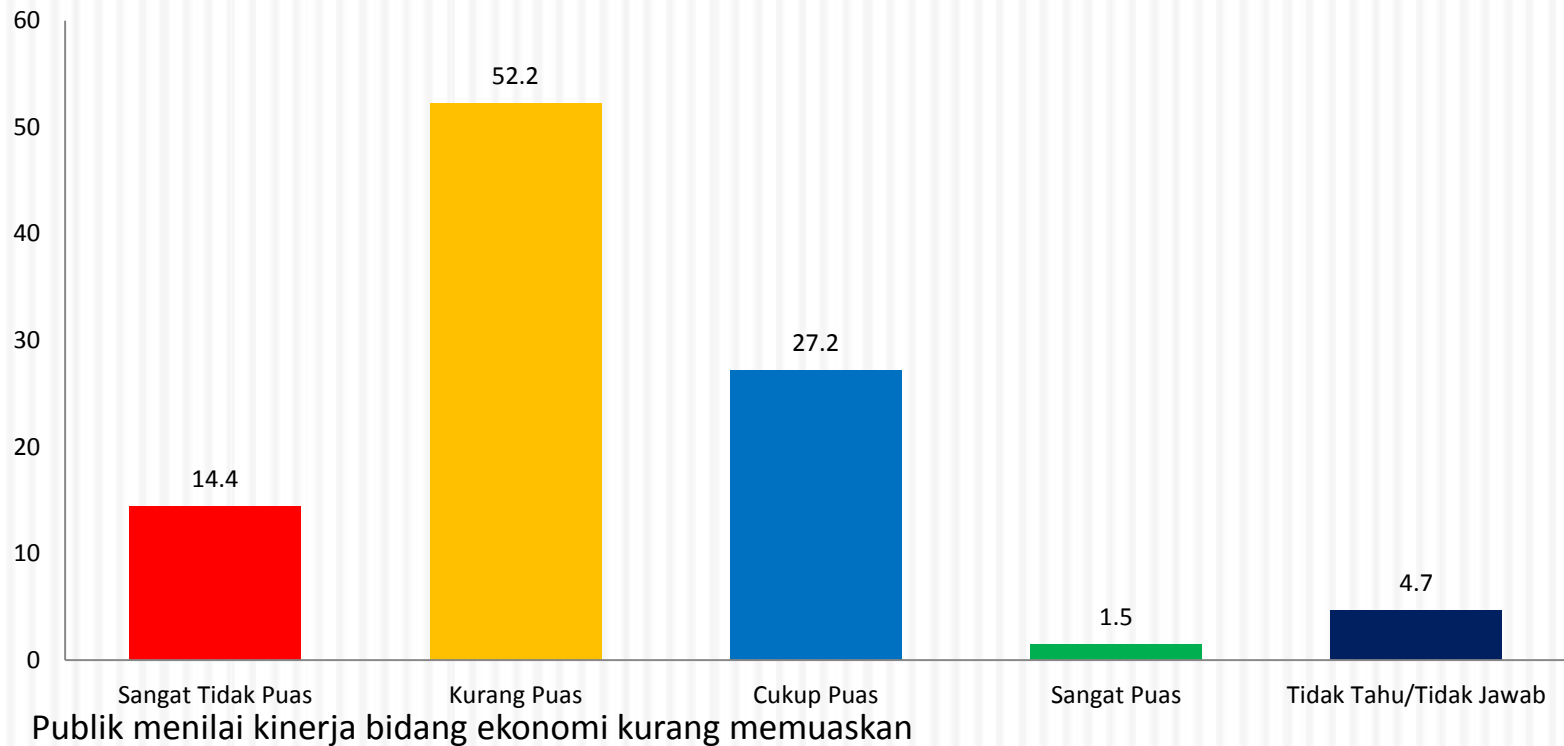
Publik cenderung kurang puas terhadap kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla

KINERJA BIDANG EKONOMI

17



Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) dalam dalam bidang ekonomi? ... (%)

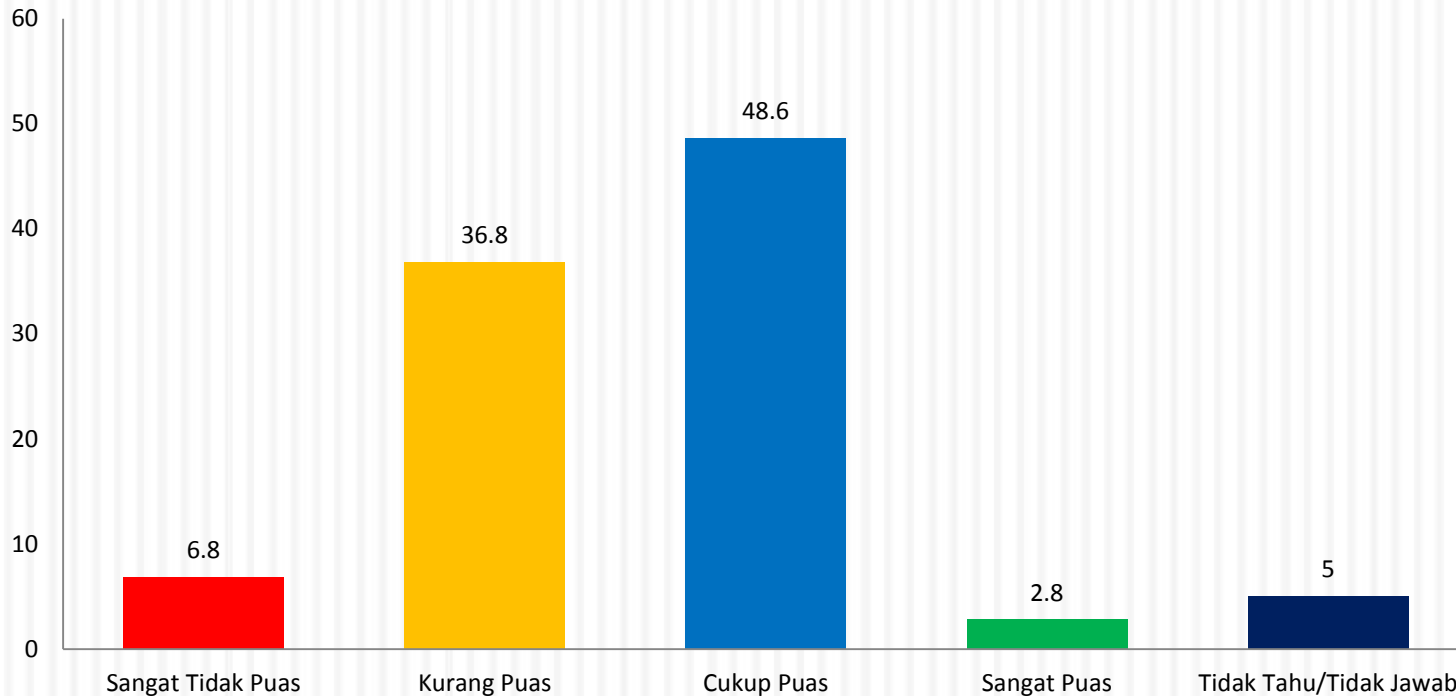


KINERJA BIDANG PENDIDIKAN

18



Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang pendidikan? ... (%)



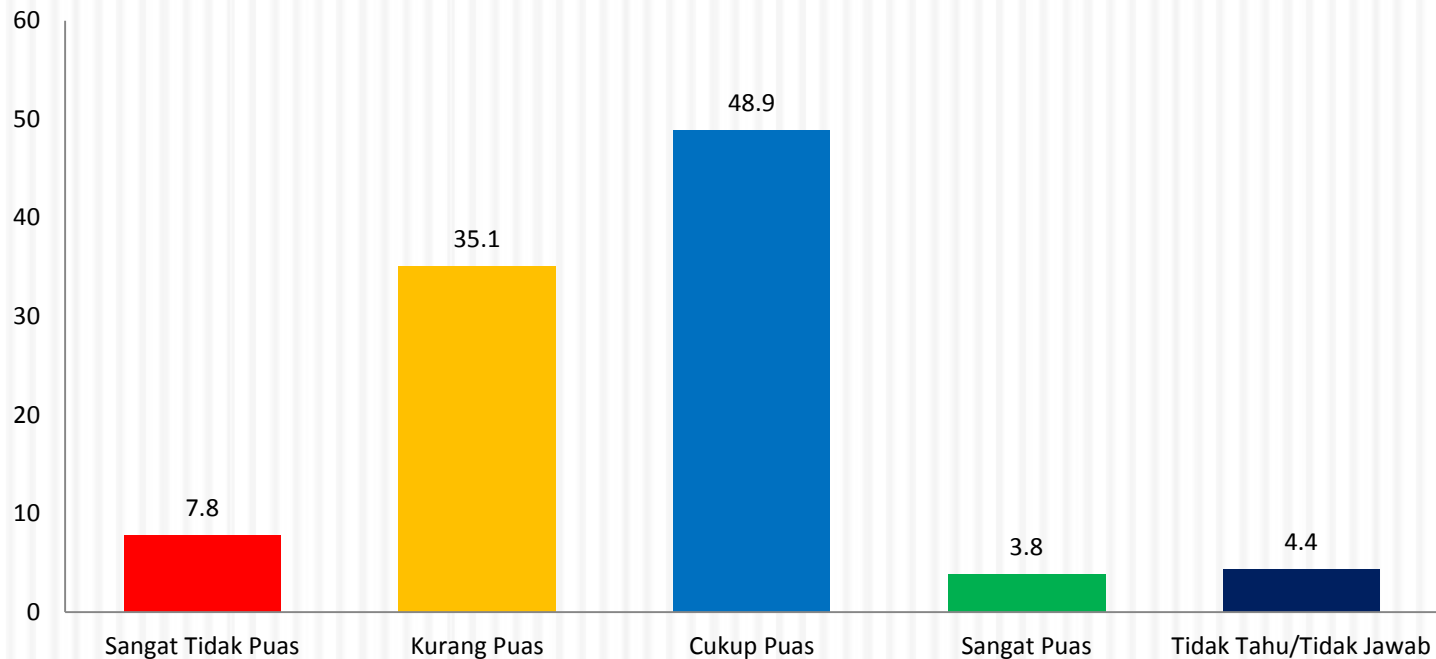
Publik menilai kinerja bidang pendidikan cukup memuaskan

KINERJA BIDANG KESEHATAN

19



Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang kesehatan? ... (%)



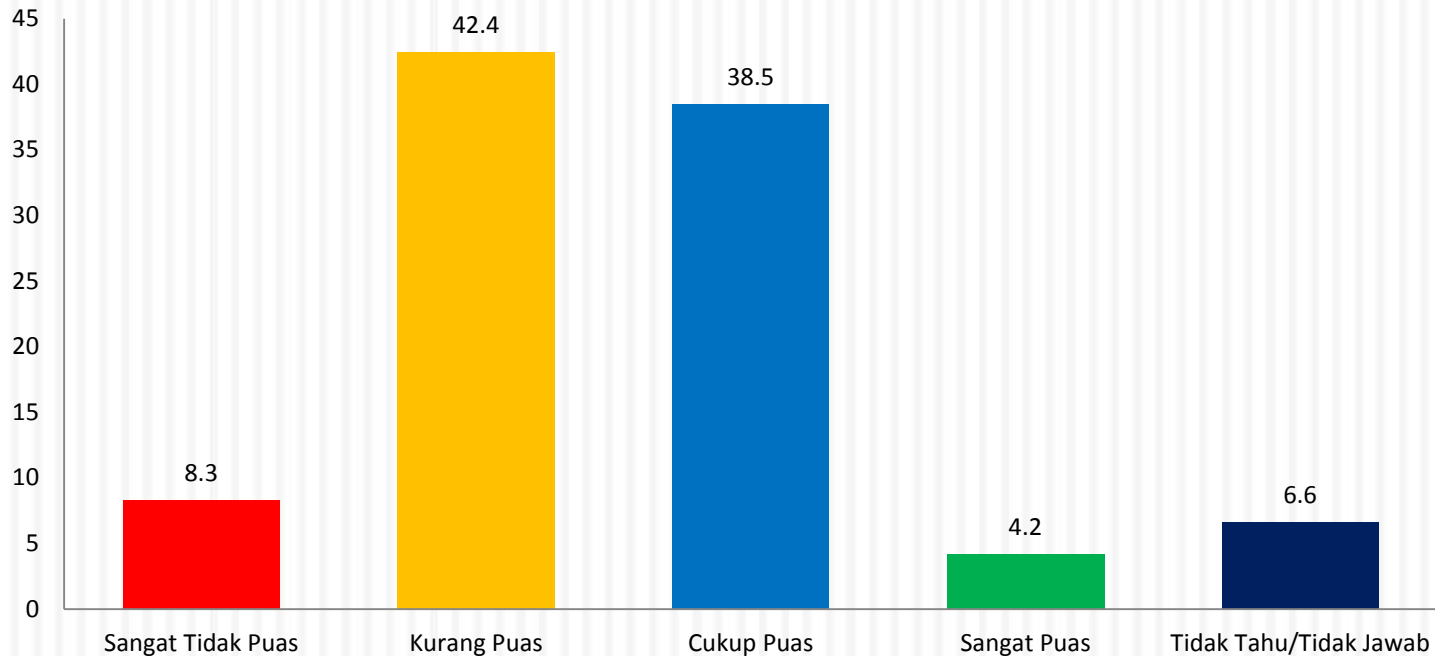
Publik menilai kinerja bidang kesehatan cukup memuaskan.

KINERJA BIDANG KEAMANAN

20



Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang keamanan? ... (%)



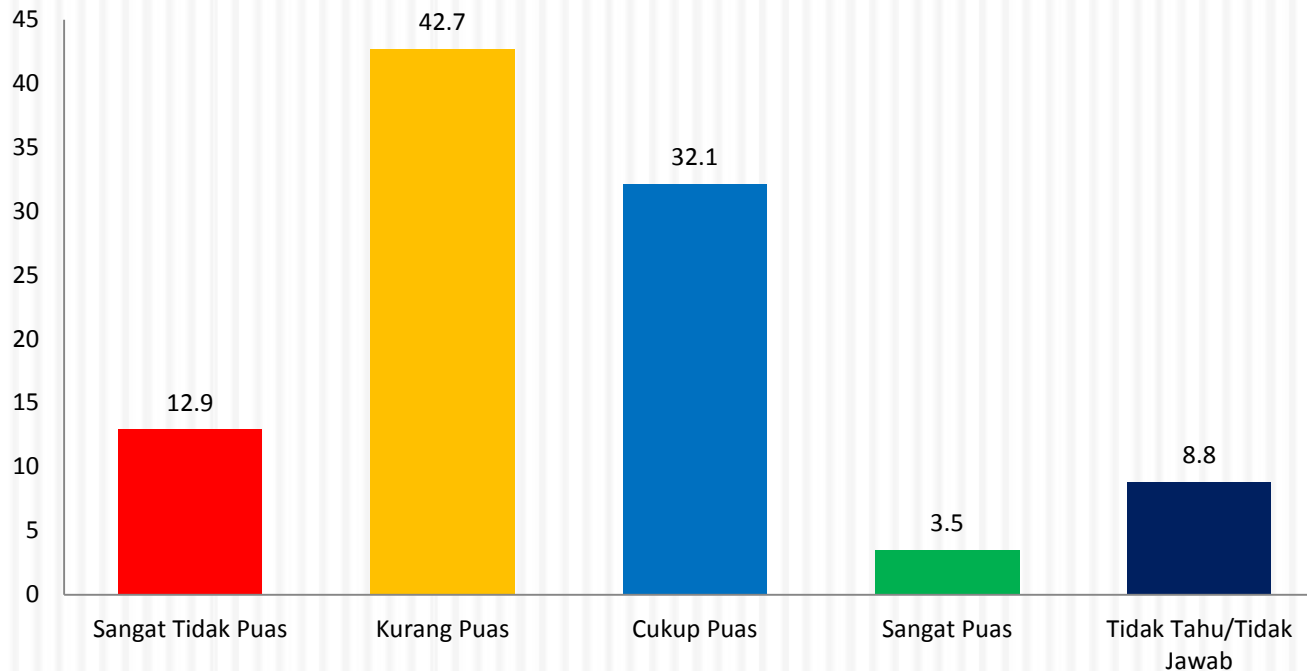
Publik menilai kinerja bidang keamanan kurang memuaskan

KINERJA BIDANG HUKUM & PEMBERANTASAN KORUPSI

21



Bagaimana kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam bidang hukum dan pemberantasan korupsi ? ... (%)



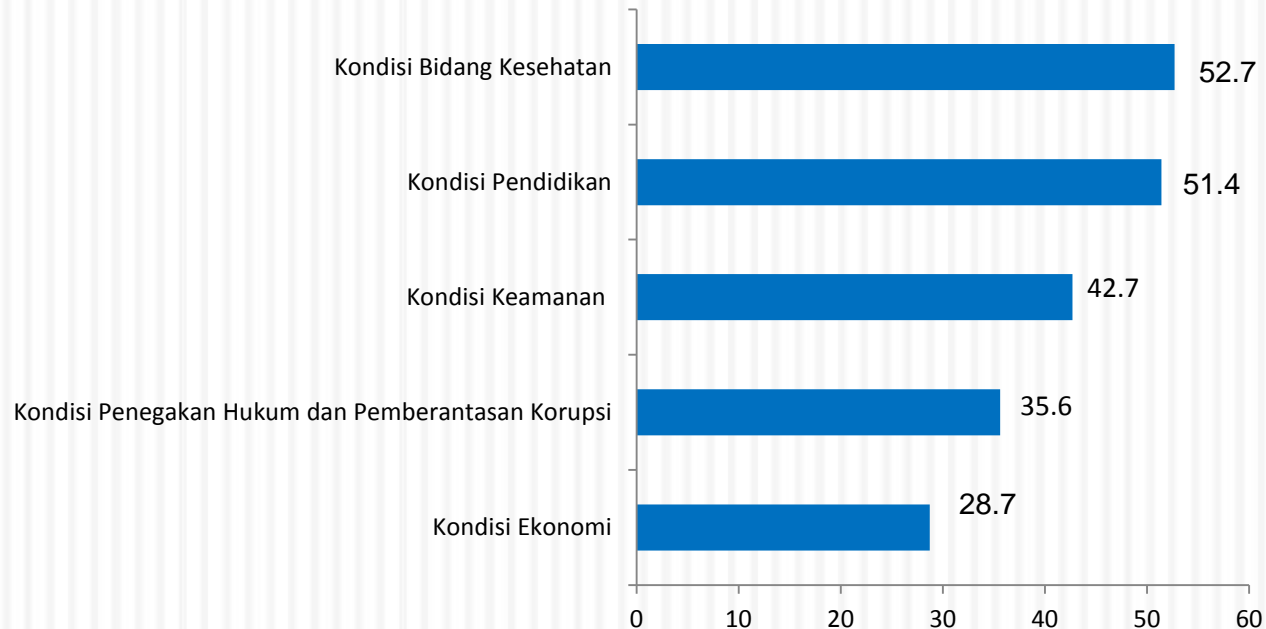
Publik menilai kinerja bidang hukum kurang memuaskan

KONDISI UMUM KINERJA JOKOWI-JK DALAM BIDANG EKONOMI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEAMANAN, DAN PENEGAKAN HUKUM

22



% Cukup Puas + Sangat Puas



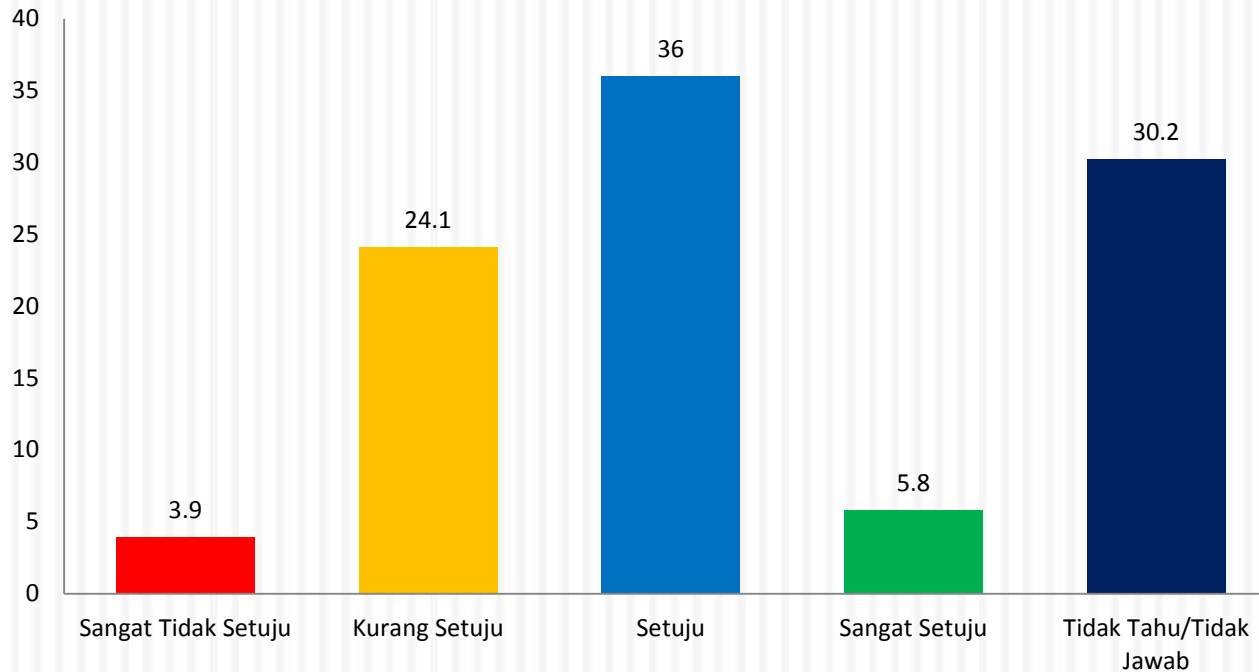
Kinerja bidang kesehatan dan pendidikan paling baik penilaiannya, sedangkan kondisi ekonomi dan penegakan hukum dinilai paling rendah. Kondisi Keamanan juga masih kurang baik.

RESHUFFLE KABINET

23



Apakah perlu dilakukan perombakan/ pergantian menteri di kabinet kerja Joko Widodo -Jusuf Kalla ? ... (%)



Secara umum publik setuju bila dilakukan perombakan di Kabinet Kerja

TEMUAN

24

- Ketidakpuasan publik yang melebihi angka kepuasan menjadi alarm bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kerjanya.
- Bila dibedah secara personal, baik kerja Jokowi maupun JK, tingkat kepuasan publik terhadap keduanya di bawah 50%.
- Tingginya ketidakpuasan publik di bidang ekonomi disebabkan oleh melambungnya harga bahan pokok, gas, listrik, serta naik-turunnya harga BBM.
- Sementara ketidakpuasan di bidang hukum disebabkan oleh praktik korupsi yang masih marak dan ketidakharmonisan antara KPK dan Polri terkait polemik kasus Budi Gunawan.
- Tingginya ketidakpuasan di bidang keamanan disebabkan maraknya aksi begal dan perampokan akhir-akhir ini.
- Bidang pendidikan dan kesehatan mendapat penilaian sedikit moderat karena biaya pendidikan cenderung stabil, munculnya beragam beasiswa dari pemerintah, serta adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru seperti program sertifikasi, dll.
- Menurut publik pemerintahan Jokowi-JK perlu melakukan perombakan/ pergantian menteri di Kabinet Kerja.

KESIMPULAN

KESIMPULAN

26

- Kesenjangan ekonomi makin besar, hal ini terlihat dari minimnya perbaikan nasib yang dirasakan oleh publik sejak setahun yang lalu. Di sisi lain, mayoritas publik terjebak dalam situasi yang sama atau stagnan dalam setahun terakhir dan bila dua hal ini tidak segera diatasi, masalah ekonomi yang kompleks akan segera terjadi.
- Ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK sudah berada di angka yang cukup mengkhawatirkan. Hal itu sudah seharusnya menjadi alarm bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan evaluasi sekaligus berbenah.
- Ketidakpuasan publik paling tinggi di bidang ekonomi, disusul bidang hukum dan bidang keamanan.
- Publik berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi-JK perlu melakukan perombakan/pergantian menteri guna memperbaiki kinerja Kabinet Kerja.

KESIMPULAN

27

- Hasil survei ini memberikan kesimpulan penting bahwa pemerintahan Jokowi-JK harus meningkatkan kualitas kinerja dengan menggenjot berbagai program dan agenda pemerintahan agar sesuai dengan yang ditargetkan. Program Nawacita dan agenda revolusi mental harus benar-benar direalisasikan.
- Pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya membangun komunikasi politik ke publik dengan efektif. Karena boleh jadi, rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini karena tidak adanya komunikasi yang sinergis, terintegrasi dan massif di lingkaran pemerintahan, sehingga terkesan tidak terjalin koordinasi yang baik dan tidak tersampai dengan baik ke publik.
- Sebagai langkah ekstrem, bila diperlukan, Presiden Jokowi dapat melakukan perombakan kabinet. Selain berfungsi sebagai penyegaran, perombakan dilakukan untuk memperbaiki performa dan kinerja Kabinet Kerja.